

Inovasi sistem Akses Pada Anggota Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM (Analisis Pada Aplikasi SiPanKa KopSyah di Provinsi Sumatra Barat)

*Muhammad Mufti Yasin¹, Gama Pratama², Dini Selasih³, Cory Vidiati⁴,
Muhammad Tegar Syaekhudin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

*Koreponden: yasinmufti42@gmail.com

Abstract

Objective - Analyze the innovation of the SiPanKa KopSyah application (Sharia Cooperative Development Monitoring Information System) in the system and ease of access for cooperative members in empowering MSMEs

Method - Literature review approach which aims to analyze the innovation of the SiPanKa KopSyah application (Sharia Cooperative Development Monitoring Information System) in the system and ease of access for cooperative members in empowering MSMEs. The registration method for searching articles is carried out by following the framework, keywords and search engines. A literature search was carried out on 8-9 October 2023 using databases (search engines), namely Emerald, Springer, Science Direct, and national journals.

Results - Through the application of technology such as SiPanKa KopSyah, cooperative members in empowering MSMEs can build a global presence, encourage sustainable practices, optimize performance, and encourage tailored strategies. This integration enables MSMEs to gain a competitive advantage, encourage collaboration, and achieve long-term success in their sustainability-based digital transformation journey.

Originality (Novelty) - The originality of this research lies in its focus on the implementation of technology in the context of sharia cooperatives and its impact on microeconomic empowerment in the region.

Implications - This research includes increasing operational efficiency of cooperatives, easy access to services for members, as well as increasing empowerment and growth of MSMEs through a more integrated and user-friendly system, which in the end can become a model for other cooperatives in Indonesia.

Keywords: Innovation, Monitoring System, Cooperatives, Sharia, MSMEs

Abstrak

Tujuan - Menganalisis inovasi aplikasi SiPanKa KopSyah (Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Koperasi Syariah) dalam sistem dan kemudahan akses anggota koperasi dalam pemberdayaan UMKM

Metode - Pendekatan literature review yang bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi SiPanKa KopSyah (Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Koperasi Syariah) dalam sistem dan kemudahan akses anggota koperasi dalam pemberdayaan UMKM. Metode registrasi dalam pencarian artikel dilaksanakan dengan mengikuti framework, kata kunci, dan search engine. Pencarian literatur dilakukan pada 8-9 oktober 2023 menggunakan database (search engine) yaitu Emerald, Springer, Science Direct, dan jurnal nasional.

Hasil - Melalui penerapan teknologi seperti SiPanKa KopSyah ini, anggota koperasi dalam pemberdayaan UMKM dapat membangun kehadiran global, mendorong praktik berkelanjutan, mengoptimalkan kinerja, dan mendorong strategi yang disesuaikan. Integrasi ini memungkinkan UMKM untuk meraih keunggulan kompetitif, mendorong kolaborasi, dan mencapai kesuksesan jangka panjang dalam perjalanan transformasi digital mereka yang berbasis keberlanjutan.

Originalitas (Novelty) - Originalitas penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap implementasi teknologi dalam konteks koperasi syariah dan dampaknya pada pemberdayaan ekonomi mikro di wilayah tersebut.

Implikasi - Penelitian ini mencakup peningkatan efisiensi operasional koperasi, kemudahan akses layanan bagi anggota, serta peningkatan pemberdayaan dan pertumbuhan UMKM melalui sistem yang lebih terintegrasi dan user-friendly, yang pada akhirnya dapat menjadi model bagi koperasi lain di Indonesia.

Kata Kunci: Inovasi, Sistem Pemantauan, Koperasi, Syariah, UMKM

Cara Sitasi: Muhammad Mufti Yasin, Gama Pratama, Dini Selasih, Cory Vidiati, Muhammad Tegar Syaekhudin. (2024). Inovasi sistem Akses Pada Anggota Koperasi dalam Pemberdayaan UMKM (Analisis Pada Aplikasi SiPanKa KopSyah di Provinsi Sumatra Barat). *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*. 2 (2), 174-187.

PENDAHULUAN

Koperasi sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan inovasi teknologi, meskipun mereka memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui teknologi. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan sumber daya finansial. Koperasi, terutama yang berskala kecil dan menengah, seringkali memiliki modal yang terbatas sehingga sulit untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk investasi teknologi yang cenderung mahal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan eksternal, seperti pinjaman atau modal ventura, semakin memperburuk situasi ini. Keterbatasan dana ini membuat koperasi tidak mampu mengakses teknologi terbaru atau melakukan penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk inovasi. Faktor lain yang signifikan adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Banyak koperasi yang beroperasi di daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang mungkin tidak memiliki akses ke tenaga kerja yang terampil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, anggota koperasi dan manajemen sering kali kurang memiliki pemahaman atau pengetahuan yang cukup tentang manfaat dan penerapan teknologi. Hal ini menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru, karena ada kekhawatiran tentang risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan teknologi tersebut. Inovasi teknologi merupakan “petualangan besar” yang tidak dapat didukung oleh sumber daya manusia atau modal, dan sangat bergantung pada risiko, sehingga menghambat sebagian besar UMKM untuk mengeksplorasi inovasi teknologi.

Konsep “inovasi kolaboratif” berasal dari kerjasama antar Koperasi antar perusahaan teknologi tinggi. Untuk mencapai situasi win-win, biasanya didasarkan pada kepentingan bersama masing-masing pihak untuk menetapkan tujuan kerjasama yang jelas. Setelah itu, sumber daya akan dibagikan, dan keuntungan yang saling melengkapi akan dimanfaatkan untuk menciptakan hasil yang positif. Inovasi kolaboratif adalah kesepakatan antara dua atau lebih entitas yang berkolaborasi yang didasarkan pada tujuan penelitian yang sama dan memiliki faktor-faktor yang saling melengkapi. Dalam pandangan Fritsch, inovasi kooperatif melibatkan pembagian kerja di antara berbagai subyek koperasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pencapaian tujuan tersebut dapat dianggap sebagai inovasi kooperatif. Inovasi kooperatif didefinisikan oleh UNCA sebagai proses pengembangan produk baru dengan bantuan Koperasi lain. Sebagai solusi terhadap dilema di atas, perusahaan-perusahaan di kota sains dan inovasi umumnya mengadopsi strategi inovasi kooperatif untuk meningkatkan daya saing inti mereka sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan dan berkualitas tinggi (Akbhari, 2023).

Inovasi koperasi sebagai kemitraan yang lebih longgar dan fleksibel antara berbagai subyek koperasi berdasarkan pembagian sumber daya dan keunggulan yang saling melengkapi, dengan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tujuan utama. Agar tetap kompetitif dalam persaingan ketat kota-kota inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi kooperatif telah menjadi jalur penting bagi perusahaan untuk berkembang; Namun, banyak dari mereka menghadapi permasalahan seperti lemahnya kemampuan penelitian dan pengembangan internal, rendahnya kemauan bekerja sama, rendahnya efisiensi inovasi koperasi, perilaku free-rider dalam kerjasama, dan peraturan pemerintah yang tidak

memadai. Akibatnya, inovasi kooperatif gagal dan banyak sumber daya terbuang percuma. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi koperasi dalam perusahaan, untuk mengurangi perilaku penumpang bebas dalam kerjasama, untuk meningkatkan kemauan perusahaan untuk bekerja sama dan berinovasi, dan untuk mendorong kelancaran pengembangan inovasi koperasi di antara perusahaan. di kota sains dan inovasi.

Inovasi kooperatif pada dasarnya adalah pengulangan kerja sama dan konflik di antara berbagai subjek yang berpartisipasi demi kepentingan mereka sendiri. Karena teori permainan evolusi didasarkan pada asumsi rasionalitas terbatas, yang lebih sesuai dengan kenyataan dibandingkan teori permainan tradisional yang didasarkan pada rasionalitas sempurna, sejumlah sarjana telah melakukan penelitian analitis dengan membangun model permainan minat inovasi kolaboratif berdasarkan hal di atas. -menyebutkan studi dengan pemerintah, universitas, dan perusahaan sebagai subjek utama. Diantaranya, mekanisme evolusi dan proses evolusi inovasi kooperatif dari perspektif dua strategi berbeda, yaitu “strategi kompetitif” dan “strategi kooperatif” (Fadliansyah, 2022). Koperasi cerdas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas layanan, dan manajemennya. Dengan mengintegrasikan model proses bisnis koperasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, bisnis koperasi telah mengembangkan cara-cara inventif untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi lainnya sangat penting dalam mewujudkan tata kelola yang cerdas dengan kolaborasi dan partisipasi berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan kolaborasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat memastikan transparansi dan kepercayaan dalam manajemen koperasi. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting dalam kerangka koperasi dan tata kelola yang cerdas. Rancangan kerangka kerja ini memprioritaskan keterbukaan dan kemandirian proses pengelolaan. Mengacu pada konsep pengelolaan koperasi yang cerdas, anggota yang cerdas, ekonomi yang cerdas, dan tata kelola yang cerdas. Misi dan tujuan kebijakan Koperasi sejalan dengan prinsip-prinsip inti koperasi. Selain itu, konsep koperasi cerdas (SC) berfungsi sebagai “peta jalan” bagi sistem koperasi. Kerangka SC membuat proses bisnis dan tata kelola menjadi lebih efisien.

Penerapan teknologi untuk solusi kooperatif menjadi lebih hemat biaya, transparan, dan produktif. Akibatnya, tata kelola TI yang efektif meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan secara langsung sekaligus meningkatkan manajemen dan efisiensi secara keseluruhan. Akibatnya, tata kelola TI terkait dengan struktur dan prosedur Koperasi, memastikan bahwa *Sipanka Kopsyah* memfasilitasi dan mendorong tujuan dan strategi Koperasi. Tujuan Pengendalian untuk Informasi dan Teknologi Terkait (COBIT) dan Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi (ITIL) adalah dua standar umum mengenai kerangka TI. Namun, tidak satupun dari perspektif ini berlaku untuk Koperasi koperasi. Teknologi telah memberikan dampak positif bagi individu dan koperasi, meningkatkan kualitas layanan, menghilangkan hambatan komunikasi antar pemangku kepentingan, dan meningkatkan penghematan biaya. Misalnya, komputasi awan memberi pengguna kontrol dan akses data online, memungkinkan mereka bertukar informasi melalui platform ini.

Platform ini memfasilitasi kenyamanan aktivitas dan administrasi koperasi. Teknologi baru membuat informasi berharga lebih tersedia dan dapat diakses, sehingga meningkatkan regulasi anggota dan regulator. Tekniknya mencakup manajemen risiko. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana TIK dapat mendukung tata kelola dan membangun aksesibilitas dan integritas dalam sistem koperasi. Koperasi diharapkan dapat memenuhi tujuan koperasi.

Koperasi cerdas terkait dengan strategi penerapan teknologi cerdas. Banyak koperasi di Thailand telah menerapkan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk membantu anggotanya mengelola transaksi bisnis dan mematuhi peraturan kegiatan. Strategi koperasi cerdas ini merupakan konsekuensi dari disrupsi teknologi yang berkaitan langsung dengan konsistensi, akurasi, visibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Meningkatkan partisipasi melalui teknologi digital merupakan tujuan yang menantang. Dalam koperasi cerdas, proses dan strategi ditingkatkan melalui *Sipanka Kopsyah*, yang menciptakan sistem koperasi yang efektif dan memfasilitasi proses. Masalah-masalah yang dihadapi anggota dalam memperoleh layanan harus diperbaiki dan prosedur-prosedur ini harus ditingkatkan. Koperasi Pola Syariah atau yang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memiliki struktur Koperasi yang terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), Pengawas (Ketua dan anggota) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing koperasi sebanyak 2 orang dengan persyaratan salah satu dari DPS harus memiliki sertifikasi dari DSN MUI. Tugas dan tanggung jawab DPS yaitu melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah melalui pemeriksaan produk-produk yang dilaksanakan koperasi untuk anggota. DPS yang sudah bersertifikasi dari DSN MUI di Sumatera Barat sebanyak 84 orang dengan ketentuan masing-masing DPS bisa menjadi DPS pada beberapa Koperasi (Sumbar, 2023). Pengawasan yang dilakukan DPS ke koperasi dilaksanakan secara reguler dan hasil pengawasan DPS tersebut dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya. Permasalahan dalam pengawasan koperasi pola syariah yang dilakukan oleh DPS antara lain:

1. Belum semua koperasi memiliki SOP tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPS
2. Belum semua koperasi yang menerapkan pengawasan oleh DPS.
3. Jumlah DPS masih terbatas untuk melakukan pengawasan.
4. Pelaksanaan dan pelaporan pengawasan DPS belum standar dan masih manual.
5. Proses konversi Koperasi dari Konvensional ke Syariah yang kurang terpantau.

LITERATUR REVIEW

Inovasi

Inovasi bukan hanya jalan organisasi menuju kesuksesan dalam lingkungan bisnis, namun juga merupakan kondisi penting untuk mempertahankannya dalam pasar yang sangat kompetitif. Dalam dua dekade terakhir, inovasi telah menjadi bidang studi yang menarik bagi para peneliti, yang mencoba mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menyelidiki dampaknya terhadap kinerja organisasi, khususnya karena relevansi praktisnya. Menjadi konsep yang banyak dipelajari, inovasi didefinisikan dalam banyak cara oleh peneliti yang berbeda. Untuk penelitian ini kami akan menggunakan definisi yang diberikan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dalam versi terbaru

Manual Oslo 2018, inovasi didefinisikan sebagai “produk atau proses baru atau lebih baik (atau kombinasinya) yang berbeda secara signifikan dari produk atau proses unit sebelumnya dan yang telah tersedia bagi pengguna potensial (produk) atau dibawa digunakan oleh unit (proses)”. Kita dapat mengamati bahwa definisi umum inovasi, yang diberikan oleh OECD, ditujukan kepada organisasi mana pun, karena organisasi tersebut menggunakan istilah umum “unit” untuk mereka yang bertanggung jawab atas inovasi. Definisi ini hanya dapat ditujukan pada sektor bisnis, sehingga kita dapat berbicara tentang inovasi bisnis, dimana perusahaan menjadi entitas utama yang bertanggung jawab atas inovasi.

Konsep keberlanjutan diperdebatkan dalam isu-isu perlindungan lingkungan sejak Komisi Brundtland, pada tahun 1987, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasinya”. Sejak itu, pengembangan konsep mempunyai tingkat ambiguitas yang besar, dan para peneliti telah mencoba untuk memahami konsep tersebut sebanyak mungkin; Oleh karena itu, dalam literatur kita menemukan banyak definisi keberlanjutan. Konsep keberlanjutan pertama kali muncul sebagai respons terhadap krisis ekologi global, yang terutama disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam oleh industri secara intensif dan degradasi lingkungan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, tujuan awalnya adalah untuk melindungi dan melestarikan kualitas lingkungan. Dari peran awal tersebut, konsep tersebut memperluas pengaruhnya, hingga ke seluruh kualitas hidup dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, kegiatan keberlanjutan dapat dilihat sebagai katalis untuk mengubah dan menyelaraskan persyaratan produksi yang lebih bersih dengan harapan dunia usaha dan masyarakat (Armadi, 2023).

Inovasi adalah kekuatan pendorong pertama pembangunan, memberikan dukungan strategis yang diperlukan untuk penciptaan sistem ekonomi modern. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Xi Jinping, “pembangunan yang didorong oleh inovasi adalah salah satu kekuatan utama dalam pembangunan kita, yaitu kelompok tentara, yang terkadang bergantung pada perusahaan kecil dan menengah, sebuah “trik”, untuk mendukung pembangunan. pengembangan inovasi perusahaan-perusahaan ini”. Pembangunan dan pengembangan kota-kota berkarakteristik berorientasi ilmu pengetahuan dan inovasi justru merupakan langkah konkrit untuk melaksanakan strategi pembangunan tersebut. Hal ini mencerminkan interaksi antara urbanisasi baru Tiongkok dan industri-industri baru, menekankan pengembangan presisi tinggi dengan mengandalkan industri tertentu, dan berfokus pada peningkatan kualitas “inovasi” dan “transformasi”.

Inovasi kooperatif memiliki keuntungan dalam mencapai sumber daya yang saling melengkapi, mengurangi risiko inovasi, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan inovasi, yang merupakan jalur signifikan untuk mempercepat pengembangan kota sains dan inovasi yang berkualitas tinggi. Konsep kota sains dan inovasi lahir sebagai hasil urbanisasi baru di suatu negara, dengan inovasi sains dan teknologi sebagai intinya dan integrasi sumber daya sebagai cara untuk mengumpulkan perusahaan sains dan teknologi, lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri. -perusahaan terkait untuk bersama-sama menghasilkan kota inovasi dan kewirausahaan yang terbuka dan kooperatif.

Terlepas dari kenyataan bahwa kota-kota inovasi sains dan teknologi saat ini memiliki prospek pengembangan yang baik, kota-kota tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti konvergensi karakteristik industri, kesulitan dalam integrasi sumber daya, transformasi pencapaian yang tidak memadai, dan seringnya persaingan jahat.

Koperasi

Koperasi adalah jenis lembaga keuangan penting yang biasanya didirikan oleh individu yang bekerja di wilayah, negara, provinsi, atau karier yang sama. Koperasi dibentuk untuk menyediakan pembiayaan, produk, dan layanan kepada anggotanya. Menurut literatur, setidaknya 12% populasi global adalah anggota koperasi. Koperasi diklasifikasikan menjadi enam kategori: pertanian, konsumen, serikat kredit, perumahan, asuransi, dan pekerja. Sementara itu, teknologi disruptif telah berdampak besar pada perusahaan koperasi, mengubah perilaku anggota dan meningkatkan persaingan pasar. Agar berhasil melayani anggotanya, koperasi harus memodifikasi proses bisnisnya. Koperasi juga merupakan lembaga penting yang membantu anggotanya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan visi dan prinsip koperasi (Nada Hidayah, 2022). Koperasi dibedakan dari badan usaha lainnya karena aliansi sukarela warga secara efektif memenuhi kebutuhan keuangan para anggotanya melalui koperasi yang dimiliki bersama dan diatur dengan baik, dan para anggota berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan hak suara yang sama.

Tujuan koperasi dirancang untuk memaksimalkan keuntungan anggota sekaligus mengurangi variasi pendapatan dan pengeluaran, seperti pasar jasa, pertumbuhan ekonomi, produk konsumen, dan peningkatan kualitas hidup anggotanya. Koperasi dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi apa pun dan beroperasi di sektor ekonomi apa pun. Koperasi adalah jenis lembaga keuangan penting yang biasanya didirikan oleh individu yang bekerja di wilayah, negara, provinsi, atau karier yang sama (Yomianti Poling, 2023). Koperasi dibentuk untuk menyediakan pembiayaan, produk, dan layanan kepada anggotanya. Menurut literatur, setidaknya 12% populasi global adalah anggota koperasi. Koperasi diklasifikasikan menjadi enam kategori: pertanian, konsumen, serikat kredit, perumahan, asuransi, dan pekerja. Sementara itu, teknologi disruptif telah berdampak besar pada perusahaan koperasi, mengubah perilaku anggota dan meningkatkan persaingan pasar. Agar berhasil melayani anggotanya, koperasi harus memodifikasi proses bisnisnya. Koperasi juga merupakan lembaga penting yang membantu anggotanya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan visi dan prinsip koperasi.

Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) adalah perspektif Koperasi mengenai investasi, penerapan, penggunaan, dan pengelolaan sistem Informasi". Tujuan utamanya adalah penyediaan dan pengoperasian SI yang mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang dan menyelaraskan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Penyelarasan ini menjadi sangat kompleks ketika sebuah perusahaan beroperasi dalam konteks internasional dan memiliki model bisnis multi-anak perusahaan. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut telah mencapai tingkat keselarasan yang tinggi, penerapan sistem yang lebih efektif umumnya akan menghasilkan peningkatan efisiensi dan kinerja bisnis. Salah satu isu utama adalah

beragamnya budaya yang sering kali harus diakomodasi oleh perusahaan multinasional dalam menerapkan strategi sistem informasi. Budaya nasional mempengaruhi keselarasan secara tidak langsung, melalui variabel-variabel dalam konteks Koperasi, termasuk komunikasi antar budaya, tata kelola TI, gaya manajemen, perbedaan nilai dan praktik kerja, serta konflik budaya KopSyah dan ketidakpercayaan”. Tantangan selanjutnya adalah mengelola semakin kompleksnya dan beragamnya teknologi digital yang diperkenalkan bersamaan atau di dalam sistem bisnis utama perusahaan (Wynn, 2024). Penggunaan analitik tingkat lanjut, aplikasi kecerdasan buatan, dan kemampuan pengambilan data pada perangkat Internet of Things (IoT), misalnya, mempunyai implikasi terhadap pemilihan dan pengoperasian sistem informasi, begitu pula berbagai opsi untuk pengoperasian sistem informasi di cloud. Hal ini termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh kegagalan keamanan siber. Dalam studi mereka tentang sistem informasi perusahaan, misalnya, ketika Koperasi lebih banyak berkomunikasi, jaringan menjadi lebih terbuka di dalam fasilitas perusahaan dan vendor, dealer, dan pelanggan mereka. Pada akhirnya, perusahaan menjadi terekspos dan semakin rentan terhadap kebocoran informasi, pencurian data, serangan siber, dan sabotase.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau unit usaha perseorangan, tidak termasuk badan usaha milik asing atau penanaman modal asing, dan didefinisikan oleh kedua aset tersebut (tidak termasuk tanah). dan bangunan) dan penjualan tahunan. Mereka juga memiliki sumber daya manusia yang terbatas, khususnya di tingkat mikro. n UKM adalah suatu entitas yang dimiliki oleh perorangan atau unit usaha perorangan, tidak termasuk perusahaan milik asing atau penanaman modal asing, dan ditentukan oleh aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan penjualan tahunan, sedangkan jumlah karyawan didasarkan pada nilai aset UKM. Daya saing UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terlalu menyederhanakan ruang lingkup UKM hanya berdasarkan kepemilikan aset dan modal, dan jelas bahwa sebagian besar elemen dalam undang-undang tersebut tidak mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh serangkaian permasalahan yang sudah berlangsung lama, termasuk akses terhadap sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi, modalitas, dan pasar. Hal ini menyebabkan kontribusi minimal 27% terhadap perekonomian nasional dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ruthinda lebih lanjut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan UKM untuk mengeksport, termasuk keadaan internal perusahaan, masalah organisasi, kebijakan industri pasar luar negeri, dan sangat terbatasnya dukungan pemerintah (Sedyastuti, 2018). Dengan karakteristik tersebut, pendekatan kebijakan afirmatif dalam pemberdayaan UKM dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1966 hingga tahun 1988. Dengan pendekatan ini, UKM dianggap sebagai sektor lemah yang perlu dibantu dengan berbagai program bantuan permodalan atau skema kredit, bantuan teknis, dan kerjasama perusahaan besar. Pendekatan ini disebut pendekatan berbasis pasar (Ulil Albab, 2023). Namun kebijakan tersebut belum berhasil

meningkatkan kualitas UKM, khususnya di tingkat mikro dan kecil. Untuk itu, sejak tahun 2000, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Program Sains dan Teknologi berupaya menerapkan pendekatan berbasis sosial. Dalam konsep wirausaha sosial, melalui kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan akademisi pendidikan tinggi se-Indonesia, bantuan yang diberikan kepada pengusaha UMKM tidak lagi diberikan dalam bentuk modal finansial melainkan sebagai bantuan. transfer teknologi tepat guna.

METODE

Literature review adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan merangkum pengetahuan yang telah ada mengenai suatu topik tertentu melalui kajian literatur yang relevan (Marzali, 2017). Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah atau topik penelitian yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan pencarian sumber-sumber literatur yang berkaitan. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang topik yang sedang dikaji. Tahap berikutnya adalah evaluasi kritis terhadap setiap sumber yang ditemukan, yang melibatkan penilaian terhadap kualitas metodologi, validitas, dan reliabilitas hasil penelitian yang dilaporkan. Setelah evaluasi, langkah selanjutnya adalah sintesis informasi, di mana peneliti menyusun ulang data dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti. Selama proses ini, penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, yakni area yang belum banyak diteliti atau masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Identifikasi kesenjangan ini membantu menentukan arah penelitian selanjutnya dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang tersebut. Literature review tidak hanya menyediakan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan, tetapi juga membantu peneliti memahami konteks historis dan evolusi ide-ide terkait topik tersebut. Ini memastikan bahwa penelitian baru didasarkan pada fondasi pengetahuan yang solid dan relevan, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (Machi dan McEvoy, 2012).

Dalam melakukan literature review, peneliti harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan teori yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tinjauan literatur tidak hanya mencakup studi-studi yang mendukung hipotesis atau pandangan peneliti, tetapi juga mencakup studi-studi yang mungkin menawarkan perspektif atau temuan yang berlawanan. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun argumen yang lebih komprehensif dan kritis terhadap topik yang dibahas. Proses ini juga membantu dalam mengidentifikasi teori-teori utama dan variabel-variabel kunci yang relevan, serta metodologi yang paling sesuai untuk penelitian lebih lanjut. Literature review juga memainkan peran penting dalam justifikasi penelitian baru. Ini tidak hanya membantu dalam membangun dasar bagi proposal penelitian, tetapi juga dapat menarik minat dan dukungan dari komunitas akademik, pembuat kebijakan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, literature review berfungsi sebagai jembatan antara penelitian yang telah ada dan inovasi baru, memastikan bahwa penelitian yang

dilakukan relevan, berdampak, dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dewan pengawas syariah menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (shari'a compliance assurance). Kepatuhan syariah merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan dan kebijakan internal yang relevan yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah. Koperasi Pola Syariah atau yang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memiliki struktur Koperasi yang terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), Pengawas (Ketua dan anggota) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing koperasi sebanyak 2 orang dengan persyaratan salah satu dari DPS harus memiliki sertifikasi dari DSN MUI. Tugas dan tanggung jawab DPS yaitu melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah melalui pemeriksaan produk-produk yang dilaksanakan koperasi untuk anggota (Dispokum, 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya, model konseptual koperasi cerdas telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dari penelitian ini dalam melihat bagaimana bagian-bagian penting dari koperasi cerdas saling mempengaruhi. Data menunjukkan bahwa, tanpa perbaikan manajemen dan pelayanan, sulit mengarahkan pertumbuhan koperasi (koperasi) dalam jangka panjang dengan baik. Misalnya, prosesnya didigitalkan; Namun, pihaknya belum puas. Prosesnya masih terduplikasi, memakan waktu lama, dan tidak tersedia. *Sipanka Kopsyah* saat ini berperan penting dalam memfasilitasi proses tersebut. Hal ini ditemukan sebagai tujuan dan pencapaian utama dalam koperasi mengenai usaha koperasi.

Anggota didorong untuk berpartisipasi menggunakan *Sipanka Kopsyah* untuk meningkatkan keterlibatan anggota, pengelolaan pengetahuan, dan komunikasi untuk menjamin pembangunan koperasi yang berkelanjutan. Pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan layanan dan kinerja. Sistem informasi (SI) yang mendukung administrasi dan komunikasi terkait proses belajar mengajar, mengatur, dan mendistribusikan materi pendidikan. Pendekatan paling populer untuk mengakses sumber daya di komputer, laptop, ponsel pintar, dan tablet adalah *e-learning*. *E-learning* menawarkan banyak keunggulan dibandingkan metode pembelajaran tradisional. Ekonomi cerdas harus mendukung manajemen dan layanan koperasi. *Sipanka Kopsyah* sangat penting untuk mempromosikan kolaborasi anggota, proposisi nilai, dan penciptaan nilai bersama. Ini berkinerja baik untuk manajemen kualitas dan layanan koperasi. Untuk memenuhi kebutuhan anggota dan mendapatkan keunggulan kompetitif, konsep proposisi nilai harus mempertimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan. Selain itu, layanan yang didukung *Sipanka Kopsyah* meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan efisiensi pemberian layanan, dan meningkatkan standar hidup anggota. Tata kelola yang cerdas menggunakan teknologi untuk mendukung operasi pemerintah, undang-undang, dan peraturan. Peraturan, pemantauan, penilaian, dan tata kelola perusahaan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap koperasi. Saluran-saluran baru yang inovatif dan pemerintah

diusulkan, seperti e-governance dan e-demokrasi, termasuk prosedur seperti *e-voting*, untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang demokratis dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan (Li, 2022).



Gambar 1. Mind Map SiPanKa KopSyah

Proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam memantau pengelolaan koperasi. Untuk meningkatkan dan memastikan manajemen yang efisien dan menghindari risiko apa pun, sistem tata kelola mengarah pada pemantauan dan pengelolaan kualitas informasi. Keberhasilan dalam menarik dan menginspirasi anggota dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, yang merupakan faktor kunci dalam perasaan kepemilikan. *Sipanka Kopsyah* juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas data, pertukaran informasi, integrasi, dan pemantauan, sehingga secara signifikan meningkatkan akurasi dan efektivitas pengambilan keputusan. Selain itu, tata kelola TI sangat penting untuk tata kelola yang cerdas dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi.

Pembahasan

Kebutuhan untuk meningkatkan layanan dan manajemen koperasi merupakan tantangan besar dalam mengarahkan pembangunan koperasi yang berkelanjutan. Bagian ini

membahas dan menyajikan kerangka pengelolaan koperasi cerdas berdasarkan temuan pada bagian Hasil, yang menunjukkan kontribusi utama penelitian ini dalam mengkaji dampak kerangka koperasi cerdas. Untuk mempromosikan nilai-nilai koperasi, bisnis koperasi, dan tata kelola koperasi dalam koperasi cerdas, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip koperasi, model bisnis, dan teknologi. Teknologi informasi saat ini sangat penting dalam memudahkan proses tersebut. Dalam kaitannya dengan usaha koperasi, ternyata hal tersebut merupakan tujuan dan pencapaian utama koperasi. Untuk mendorong dan mendukung efisiensi dan tata kelola dalam manajemen koperasi, penelitian ini menyarankan arsitektur koperasi cerdas yang dipisahkan menjadi lima lapisan berdasarkan ide EA.

Kontribusi UMKM syariah terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah dan menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Jumlah UMKM yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah sebagai sumber bahan baku ekonomi, serta Koperasi usaha yang cukup fleksibel menjadi faktor yang mendorong menguatnya UMKM. ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk menunjukkan partisipasi maksimalnya dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM juga mempunyai peluang untuk membangun kinerja Koperasi dan meningkatkan kinerja keuangannya serta meningkatkan produktivitas usaha dengan memanfaatkan momentum digitalisasi ekonomi sebagai bagian dari inovasi keuangan dan literasi keuangan. Kontribusi tersebut merupakan hal yang positif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera (Fitriani, 2022).

Lapisan bisnis merupakan lapisan utama yang fokus pada pelayanan dan pengelolaan koperasi. Misinya adalah untuk melayani dan menyediakan produk dan layanan kepada anggotanya. Lapisan bisnis terdiri dari operasi inti dan operasi pendukung. Operasi inti adalah peminjaman, penyimpanan, dan perdagangan. Platform elektronik dapat memungkinkan anggota dan manajemen untuk mengakses produk dan layanan dengan lebih mudah dibandingkan saluran desktop. Oleh karena itu, kerangka ini mengubah saluran yang ada menjadi saluran elektronik. Namun seluruh operasional koperasi harus mengikuti asas koperasi (CPs). Pelayanan koperasi meliputi anggota dan pengurus, termasuk pemangku kepentingan terkait. Operasi dukungan mendukung proses pengambilan keputusan, pemerintahan, dan promosi. Lapisan ini dirancang untuk meningkatkan proses bisnis koperasi, kualitas layanan, dan efisiensi manajemen dengan teknologi informasi dan komunikasi (*Sipanka Kopsyah*).

Lapisan aplikasi manajemen koperasi cerdas dirancang untuk mendukung bisnis koperasi dengan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan dan meningkatkan layanan anggota dan manajemen koperasi dengan dukungan fungsi inti dan pendukung. Lapisan ini memfasilitasi seluruh fungsi bisnis, baik aktivitas inti maupun aktivitas pendukung. Semua aplikasi memfasilitasi bisnis koperasi untuk memungkinkan tata kelola dan efisiensi dalam koperasi. Data dan informasi berasal dari dua saluran layanan: layanan mandiri online dan layanan meja. Ketika informasi didistribusikan dengan benar, hal itu meningkatkan keakuratan dan integritas data. Arsitektur informasi koperasi telah mendorong sistem

koperasi cerdas secara signifikan. Informasi kooperatif yang dapat dioperasikan bertujuan untuk menawarkan tautan yang efektif sekaligus menjamin kualitas dan keterbukaan data. Pengelolaan data menjadi lebih mudah dengan tata kelola data, yang juga membantu tujuan interoperabilitas. Masalah keamanan, privasi, dan kontrol akses sering kali diangkut, terutama terkait data pribadi yang sensitif.

Lapisan infrastruktur dan teknologi terdiri dari teknologi-teknologi penting seperti protokol kontrol transmisi/protokol internet (TCP/IP), jaringan nirkabel, Internet of Things (IoT), komputasi awan, blockchain, data besar, antarmuka pemrograman aplikasi (API), buatan intelijen (AI), jaringan pribadi virtual (VPN), dan otomatisasi proses robotik (RPA). Lapisan ini memfasilitasi semua lapisan yang memungkinkan efisiensi dan tata kelola dalam pengelolaan koperasi. Lapisan tata kelola merupakan komponen yang sangat penting dalam kerangka manajemen koperasi yang cerdas. Ini berfokus pada pemantauan, analisis data, dan sistem pelacakan. Hambatan utama dalam menggunakan saluran layanan elektronik adalah melindungi keamanan sistem. Kebutuhan untuk meningkatkan layanan dan manajemen koperasi merupakan tantangan besar dalam mengarahkan pembangunan koperasi yang berkelanjutan. Bagian ini membahas dan menyajikan kerangka pengelolaan koperasi cerdas berdasarkan temuan pada bagian Hasil, yang menunjukkan kontribusi utama penelitian ini dalam mengkaji dampak kerangka koperasi cerdas (Chawviang, 2023). Untuk mempromosikan nilai-nilai koperasi, bisnis koperasi, dan tata kelola koperasi dalam koperasi cerdas, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip koperasi, model bisnis, dan teknologi.

UMKM menghadapi banyak tantangan ketika mengadopsi *Sipanka Kopsyah*, termasuk terbatasnya sumber daya keuangan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan digital, infrastruktur yang tidak memadai, dan penolakan terhadap perubahan. Namun, pemilik atau manajer puncak harus menyadari potensi manfaat dan peluang dari penerapan strategi *Sipanka Kopsyah* yang berfokus pada keberlanjutan dan didorong oleh kemampuan digital mereka. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan ini, UMKM dapat mengatasi tantangan dan meraih berbagai keuntungan, seperti peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing pasar, perluasan jangkauan pelanggan, dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan (Maksum, 2020). Kendala keuangan memberikan tantangan yang signifikan bagi UMKM ketika berinvestasi pada infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan *Sipanka Kopsyah*. Namun demikian, pemilik atau manajer puncak harus menyadari pentingnya realokasi sumber daya dan berinvestasi dalam strategi *Sipanka Kopsyah* berkelanjutan yang didorong oleh kemampuan digital mereka.

Pemilik atau manajer puncak harus menyadari pentingnya literasi digital dan memastikan akses terhadap program pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan digital mereka. Infrastruktur yang belum memadai, khususnya di daerah tertentu atau daerah terpencil, menjadi tantangan bagi UMKM. Pemilik atau manajer puncak harus menyadari perlunya berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur yang mendukung *Sipanka Kopsyah* berkelanjutan yang dimungkinkan oleh kemampuan digital mereka. Berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia teknologi, dan asosiasi industri, dapat membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur dan

memastikan konektivitas internet yang andal serta komponen infrastruktur penting tersedia, selaras dengan kemampuan digital mereka. Mengintegrasikan kemampuan dinamis dengan teknologi seperti Internet dan *e-commerce* menawarkan keuntungan yang signifikan bagi UMKM. Memanfaatkan platform Internet dan *e-commerce* memungkinkan UMKM untuk membangun kehadiran global, mendobrak hambatan geografis dan memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, platform e-commerce menyediakan data dan kemampuan analisis yang berharga, memberdayakan UMKM untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan, menyesuaikan strategi mereka, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Komputasi awan, teknologi lain yang terintegrasi dengan kemampuan dinamis, memberikan penghematan biaya dan skalabilitas yang besar bagi UMKM.

KESIMPULAN

Memasukkan SiPanka KopSyah ke dalam pemberdayaan UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja pasar. Analisis data pelanggan memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan, memungkinkan UMKM menyelaraskan strategi mereka dengan tren pasar. Data bisnis terintegrasi dari analisis *SiPanka KopSyah* meningkatkan ketangkasan, memberdayakan pengambilan keputusan yang tepat, dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan memanfaatkan *SiPanka KopSyah*, UMKM dapat meningkatkan kinerja lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Selain itu, kemampuan digital sangat penting bagi UMKM dalam memulai perjalanan mereka menuju keberlanjutan melalui transformasi digital. Kemampuan digital memberi UMKM alat dan sumber daya untuk memanfaatkan teknologi digital, mengoptimalkan proses, dan mendorong praktik berkelanjutan. Dengan merangkul transformasi digital dan menggunakan kemampuan digital, UMKM dapat memposisikan diri mereka untuk sukses dalam mencapai keberlanjutan dan secara aktif berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan. Melalui penerapan teknologi seperti SiPanKa KopSyah ini, anggota koperasi dalam pemberdayaan UMKM dapat membangun kehadiran global, mendorong praktik berkelanjutan, mengoptimalkan kinerja, dan mendorong strategi yang disesuaikan.

REFERENSI

- Akbhari, I., & Prathama, A. (2023). Inovasi Aplikasi E-Peken: Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 396–409. <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/90/35>
- Armadi, D. A., Armadi, D. A., Herman, H., & Syafaat, F. (2023). Analisis Sistem Inovasi Usaha Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UmkM) Pasca Pandemi Covid 19. *JURNAL DIGIPRENEUR (Bisnis Digital, Ekonomi, Dan Manajemen)*, 3(1), 1. <http://jurnal.atmaluhur.ac.id/index.php/digipreneur/article/view/1562>
- Chawviang, A., Kiattisin, S., Thirasakthana, M., & Mayakul, T. (2023). A Smart Co-Operative Management Framework Based on an EA Concept for Sustainable Development. *Sustainability (Switzerland)*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/su15097328>

- DISPOKUM. (2023). SipanKa Kopsyah (Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Koperasi Syariah). <https://diskopukm.sumbarprov.go.id/>. Diakses pada 19 April 2024.
- Fadliansyah, Marwiyati, & Adi, R. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 72–90. <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562>
- Fitriani, A. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2), 76–95. <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.637>
- Li, F., & Wang, Y. (2022). Study on the Evolutionary Game of Cooperation and Innovation in Science and Technology Town Enterprises. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14159210>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2012). *The Literature Review: Six Steps to Success*.
- Maksum, I. R., Sri Rahayu, A. Y., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3). <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Nada Hudayah, N., & Sukmana, H. (2022). Analysis of Corporate Strategy in The Development of Micro, Small, and Enterprises (MSMEs). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 17, 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v17i0.1249>
- PPID Sumbar. (2023). SiPanKa Kopsyah (Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Koperasi Syariah). <https://ppid.sumbarprov.go.id/home/details/22054-sipanka-kopsyah-sistem-informasi-pemantauan-perkembangan-koperasi-syariah.html>. Diakses pada 19 April 2024.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Ulil Albab, S. H. S., Widayanto, E., & Sibarani, K. B. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 74–86. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>
- Wynn, M., & Weber, C. (2024). Information Systems Strategy for Multi-National Corporations: Towards an Operational Model and Action List. *Information (Switzerland)*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/info15020119>
- Yomianti Poling, M., Herdi, H., & Libu Lamawitak, P. (2023). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2), 105–114.